



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
SUB UNIT KERJA : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GUNTUR
2. Jabatan : REKTOR
3. NHK : 70048

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 734.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/160 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 116 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 174.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 210.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI NINJA 250CC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
5. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 102.600.000

D. SURAT BERTAGIH Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 210.648.616

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	1.257.248.616
III. HUTANG	Rp.	104.181.555
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.153.067.061

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.